



Efektifitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Akuntansi Sektor Publik

Eva Anggra Yunita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email: evaanggra95@gmail.com

Abstract

Regional Government Accounting Performance is the output/result of a program that will be or has been achieved in connection with the use of regional budgets with measurable quality and quantity, regional capabilities can be measured by assessing the efficiency of services provided to the community. This study aims to determine the Effectiveness of Government Accounting Performance in the Regional Government of Tegal Regency in 2016-2019 based on the calculation of financial ratio analysis. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data used is secondary data in the form of the Regional Government Financial Report (LKPD) of Tegal Regency 2016-2019. The results of the research conducted showed that the Government Accounting Performance in the Tegal Regency Government in 2016-2019, (1) the PAD Effectiveness Ratio was categorized as quite effective with a value of 97.07%; (2) the Expenditure Efficiency Ratio is categorized as less efficient with a value of 91.04%; (3) The Expenditure Harmony Ratio still prioritizes the operational expenditure allocation of 78.38%, which is higher than the capital expenditure ratio of 21.38%.

Keywords: *PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Efficiency Ratio, Accounting Performance Expenditure Ratio.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat hanya melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan daerah. Menurut penelitian Soedarsa (2020) laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, akan tetapi tidak semua kepala daerah dapat memahami mekanisme akuntansi. Akuntansi menjadi alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sementara informasi dalam laporan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga untuk memudahkan dalam mengimplementasikan dan menafsirkan laporan keuangan tersebut dapat dibantu menggunakan analisis laporan keuangan.

Efektivitas analisis kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan masing-masing Pemda. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pada suatu daerah



yaitu dengan menganalisis rasio keuangan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut penelitian Ropa (2016) analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, selain itu dapat juga digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah dikarenakan kebijakan inilah yang memberikan keleluasaan pemda dalam mengelola keuangan daerahnya yang seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dituntut supaya mampu dalam membangun ukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja akuntansi untuk kepentingan umum dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan koreksi efisiensi dengan membandingkan pola kerja dan pelaksanaannya. Disamping itu bisa juga digunakan sebagai tolak ukur dalam peningkatan kinerja, terutama dalam akuntansi pemerintahan daerah pada periode selanjutnya. Pengukuran kinerja sektor publik menjadi hal terpenting karena bertujuan untuk membantu pemda dalam melakukan penilaian implementasi strategi melalui alat pengukuran keuangan (Ropa, 2016).

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa, analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja akuntansi pemda dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya yaitu rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio efisiensi belanja yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah. Rasio keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Rasio keserasian belanja dibagi menjadi dua yaitu rasio belanja operasi dan modal. Keduanya sama-sama membandingkan antara realisasi belanja dengan total belanja daerah.

Kabupaten Tegal merupakan daerah yang memiliki usaha aset yang baik terutama pada sektor jasa dan pariwisata, hal ini yang berpotensi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Sehingga hal tersebut akan berdampak baik pada realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya. Pada umumnya tujuan dari Kinerja Akuntansi yaitu untuk menilai efektifitas dari rasio belanja pemerintah daerah kabupaten tegal.



TINJAUAN PUSTAKA

Pandjaitan, Parengkuan dan Victoria (2018) menunjukkan bahwa, rata-rata derajat desentralisasi dikategorikan masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja dikategorikan kurang efisien.

Susanto (2019) menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikategorikan masih rendah, rasio aktivitas dikategorikan kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD dikategorikan kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.

Maulina dan Rhea (2019) hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan lokal, dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan antara tingkat kemerdekaan daerah Kalimantan Barat (Borneo) berada dalam kriteria "partisipatif". Tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori "cukup". Tingkat efektivitas masuk dalam kategori "efektif", sementara tingkat efisiensi masuk dalam kategori "kurang efisien". Rasio keserasian menunjukkan keseimbangan pengeluaran "tidak seimbang" dan Rasio pertumbuhan yang masih berfluktuasi.

Sartika dan Pratama (2019) meneliti bahwa, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sangat rendah dengan rasio rata-rata 9,83%. Selanjutnya jika diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan efisiensi dengan rasio rata-rata 67,51%. Kemudian ketika diukur dengan rasio efektivitas PAD menunjukkan efektif dengan rasio rata-rata 112,51%. Ketika diamati oleh rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi fluktuasi. Terakhir, diukur dari rasio keserasian, terutama rasio pengeluaran operasional menunjukkan rata-rata 64,95% dan belanja modal 31,53%.

Soedarsa (2020) analisis kinerja keuangannya dapat disimpulkan, rata-rata rasio kemandirian lokal Kabupaten Pesawaran yang berada dalam pola hubungan instruktif. Namun tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pesawaran masuk kategori

cukup efektif. Sementara tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masuk kategori relatif kurang efisien, kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran masih belum ideal. Dapat dilihat dari rata-rata Saham dan Pertumbuhan, posisi Kabupaten Pesawaran berada di kuadran II.

Data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Te- gal dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan dan juga menggunakan analisis *trend* yaitu :

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, (2016)

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Rasio Efisiensi Belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	90% - 100%

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Halim (2012)

Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Belanja Operasi :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sampai saat ini tidak ada pedoman yang ideal besarnya rasio keserasian belanja, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan daerah serta kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan daerah (Halim, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun 2016-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis data merupakan alat yang digunakan dalam membahas suatu permasalahan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun cara analisis yang digunakan meliputi:

1. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh di BPKAD Kabupaten Tegal.
2. Membuat grafik untuk mengetahui laju pertumbuhan dari seluruh periode penelitian.
3. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan daerah terhadap APBD dari masing-masing periode pada tahun sebelumnya.

4. Menarik kesimpulan atas perhitungan rasio keuangan daerah berdasarkan kriteria dari masing-masing rasio yang telah ditentukan. Sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Rasio Efektivitas PAD

Hasil Perhitungan dari Rasio Efektivitas PAD dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019**

Tahun	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2016	101,7	Sangat Efektif
2017	101,46	Sangat Efektif
2018	88,88	Kurang Efektif
2019	96,89	Cukup Efektif
Rata-rata	97,07	Cukup efektif

Sumber: LKPD Kab. Tegal yang diolah (2021)

Berdasarkan data yang tercantum di tabel 3, dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas PAD untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio efektivitas PAD sebesar 101,07%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 101,46%, lalu rasio efektivitas PAD pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 88,88% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 96,89%. Jika dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama periode 4 tahun sebesar 97,07% yang mana dikategorikan cukup efektif, karena berada di skala 90%-99% sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat efektivitas PAD.

Rasio Efisiensi Belanja

Hasil perhitungan dari Rasio Efisiensi Belanja dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Belanja
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019**

Tahun	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kriteria
2016	87,21	Cukup Efisien
2017	92,56	Kurang Efisien
2018	92,29	Kurang Efisien
2019	92,11	Kurang Efisien
Rata-rata	91,04	Kurang Efisien

Sumber: LKPD Kab. Tegal yang diolah (2021)

Berdasarkan data yang tercantum di tabel 4 dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Belanja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio efisiensi belanja sebesar 87,21%, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 92,56%, selanjutnya rasio efisiensi belanja pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 92,29% dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 92,11%. Jika dilihat dari rata-rata rasio efisiensi belanja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 sebesar 91,04% yang mana dikategorikan kurang efisien, sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat efisiensi belanja dimana skala 90%-100% merupakan kriteria sangat kurang efisiensi.

Rasio Keceragaman Belanja

Rasio ini terdiri dari Rasio Operasi dan Rasio Belanja Modal, hasil perhitungannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 5. Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019**

Tahun	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	74,69	24,95
2017	78,34	21,25
2018	80,15	21,28
2019	80,34	19,65
Rata-rata	78,38	21,38

Sumber: LKPD Kab. Tegal yang diolah (2021)



Berdasarkan data yang tercantum di tabel 5 dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Rasio belanja operasi pada tahun 2016 sebesar 74,69%, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 78,34%, selanjutnya rasio belanja operasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 80,15% dan tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 80,34%. Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja operasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 sebesar 78,38%.

Rasio Belanja Modal untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio belanja modal pada tahun 2016 sebesar 24,95%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21,28% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan 19,64%, lalu rasio belanja modal pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 19,65%. Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 sebesar 21,38%

PEMBAHASAN

Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, rasio efektivitas PAD pada tahun 2016 dikategorikan sangat efektif dengan nilai sebesar 101,07%. Kemudian pada tahun 2017 hasil perhitungan rasio efektivitas PAD sebesar 101,46% di atas rata-rata secara keseluruhan, dikategorikan sangat efektif serta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dikategorikan kurang efektif, karena mengalami penurunan sebesar 88,88% di bawah rata-rata secara keseluruhan. Dan pada tahun 2019 hasil perhitungan rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan kembali sebesar 96,89% yang mana dikategorikan cukup efektif. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dan 2017 sudah sangat efektif, karena nilai yang diperoleh sudah melebihi 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Rasio Efektivitas PAD untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama tahun 2016-2019 dikategorikan cukup efektif dengan nilai sebesar 97,07%. Pemerintah Daerah Kab. Tegal sudah berupaya dengan baik menerapkan kinerjanya sehingga mampu melebihi target yang telah dianggarkan. Namun ada kompo-



nen PAD yang capaiannya masih di bawah target yang telah dianggarkan, yaitu pendapatan retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar 93,82% (kurang Rp. 1.404.214.754,00 atau 6,18%), kemudian pada tahun 2017 sebesar 92,74% (kurang Rp. 1.569.685.105,00 atau 7,26%), lalu pada tahun 2018 sebesar 67,01% (kurang Rp. 8.779.583.655,00 atau 32,99%), dan pada tahun 2019 sebesar 81,29% (kurang Rp. 5.803.004.079,00 atau 18,71%) serta lain-lain PAD yang sah pada tahun 2019.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus mampu meningkatkan kembali pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2019 adalah hasil perolehan dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, hal ini dibuktikan selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kab. Tegal memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan mampu melebihi target yang telah dianggarkan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kab. Tegal harus mampu mengoptimalkan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai sumber-sumber penerimaan pendapatan, agar tidak bergantung dan menunggu bantuan transfer dana dari pusat.

Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil penelitian, rasio efisiensi belanja pada tahun 2016 dikategorikan cukup efisien dengan nilai sebesar 87,21% di bawah rata-rata secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2017 hasil perhitungan rasio efisiensi belanja sebesar 92,56% di atas rata-rata secara keseluruhan, dikategorikan kurang efisien serta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 hasil perhitungan rasio efisiensi belanja dikategorikan kurang efisien, walaupun sudah mengalami penurunan sebesar 92,29%. Dan pada tahun 2019 hasil perhitungan rasio efisiensi belanja kembali mengalami penurunan sebesar 92,11% yang mana masih dikategorikan kurang efisien.

Realisasi Belanja tahun 2016 sudah cukup efisien, karena nilai yang diperoleh berada pada skala 80%-90% atau di bawah target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 berada pada skala 90%-100%, artinya nilai yang diperoleh kurang efisien atau mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Rasio Efisiensi Belanja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama tahun 2016-2019 masih dikategorikan kurang efisien dengan nilai sebesar 91,04%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus mampu menerapkan kinerjanya dengan baik lagi dalam mengoptimalkan penghematan anggaran agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada target yang telah dianggarkan. Pemborosan anggaran yang kerap terjadi ialah biaya yang dikeluarkan banyak tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal. Oleh karena itu, salah satu bentuk penghematan anggaran adalah dengan cara mengeluarkan biaya yang sedikit atau biaya yang dibutuhkan, tetapi hasil yang dicapai dapat maksimal. Prestasi ini yang harus dipertahankan karena semakin menghemat anggaran, maka anggaran tersebut akan dapat dipergunakan untuk hal lainnya yang lebih penting.

Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja terdiri dari Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 2,070 miliar, kemudian tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,056 miliar, lalu tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,127 miliar dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,210 miliar.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Rasio belanja operasi pada tahun 2016 sebesar 74,69%. Kemudian pada tahun 2017 rasio belanja operasi sebesar 78,34% mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi kembali mengalami kenaikan sebesar 80,15%. Dan pada tahun 2019 rasio belanja operasi juga mengalami kenaikan sebesar 80,34%. Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja operasi untuk Pemerintah Daerah Kab. Tegal selama periode 4 tahun sebesar 78,38%.

Rasio Belanja Modal untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio belanja modal pada tahun 2016 sebesar 24,95%. Kemudian pada tahun 2017 rasio belanja modal sebesar 21,28% mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio belanja modal kembali mengalami penurunan sebesar 19,64%. Dan pada tahun 2019 rasio belanja modal mengalami kenaikan kembali sebesar 19,65%. Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kab. Tegal selama periode 4 tahun sebesar 21,38%.

Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal masih mengutamakan prioritas alokasi untuk kebutuhan belanja operasi sehingga kebutuhan belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 78,38% lebih besar jika dibandingkan dengan rasio belanja modal sebesar 21,38%. Pemerintah Daerah Kab. Tegal lebih banyak mengeluarkan biaya rutin atau berulang untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi, yang mengakibatkan kebutuhan belanja modal untuk membiayai pembangunan daerah relatif kecil. Sebagian besar dana belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk persentase dari setiap belanja operasi maupun belanja modal. Sehingga Pemerintah Daerah Kab. Tegal masih berfokus terhadap pengeluaran-pengeluaran rutin atau berulang untuk pemenuhan aktivitas pemerintah daerah, yang akhirnya mengakibatkan pengeluaran belanja modal untuk pembangunan daerah masih relatif kecil. Pembangunan daerah sangatlah penting dan perlu diperhatikan agar pelayanan masyarakat dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran APBD merupakan dana publik, sehingga dana tersebut harus dimanfaatkan untuk publik juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 dikategorikan cukup efektif dengan nilai sebesar 97,07%.
2. Rasio Efisiensi Belanja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 dikategorikan kurang efisien dengan nilai sebesar 91,04%.
3. Rasio Keserasian Belanja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa masih mengutamakan prioritas alokasi untuk kebutuhan belanja operasi sehingga kebutuhan belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 78,38% lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja modal sebesar 21,38%.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :



1. Disarankan yang menggunakan penelitian yang sama untuk melakukan studi eksploitasi pada setiap komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga hasilnya spesifik.
2. Disarankan menambah, mengurangi atau mengganti pada rasio keuangan, menambah rentang waktu penelitian dan memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya 1 kabupaten/Kota akan tetapi bisa lebih luas lagi agar dapat membandingkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi?. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1), 46-59.
- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal?. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9-17.
- Halim, A. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kab. Tegal, LKPD (2021). *Profil dan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Tegal*. Retrieved 05 06, 2021, from BPKAD Kab. Tegal. ID: <https://bpkad.tegalkab.go.id/>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran. *Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi*.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 11-22.
- Nur, A. M. A., & Dadan, R. (2017). Analysis of abnormal return, stock return and stock liquidity before and after buyback share: case study of companies listed in Indonesia stock exchange in period of 2011-2015. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 71(11).
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(2), 738-747.



Soedarsa, H. G. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 74-91.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.